

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan pada bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka sebagai penjelasan mengenai ide-ide mendasar yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, dan didasari dengan adanya penelitian terdahulu, selain itu pada bab ini penulis akan membahas mengenai kerangka pemikiran teoritis yang pembahasannya mengenai model dan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat, selanjutnya diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya, kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable* (Supanca, 2006)

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang

berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Rokhmatussa & Suratman, 2009)

Menurut Satriawan (2021) dalam bukunya yang berjudul Hukum Investasi di Indonesia, Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Selain itu, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi langsung (*Direct Investment*) yang diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek dengan jangka waktu panjang guna memperoleh pendapatan reguler, partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana, dan risiko usaha. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, mengonversi pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan material, maupun dengan memberikan lisensi.
- b. Investasi tidak langsung (*Portfolio Investment*), diartikan sebagai kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut juga dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat bergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan (Kairupan, 2013).

2.1.2 Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*)

2.1.2.1 Pengertian Investasi Asing Langsung

Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha dari suatu negara ke perusahaan negara ke perusahaan yang berlokasi di negara lain, dengan tujuan membangun hubungan jangka menengah hingga panjang serta memiliki pengaruh nyata terhadap pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan tersebut. FDI umumnya diwujudkan melalui pendirian usaha baru, perluasan kegiatan bisnis, atau pengambil alih sebagian kepemilikan saham perusahaan di negara tujuan. dalam proses ini terjadi alih sumber daya baik dalam bentuk modal, teknologi, maupun manajemen yang disertai dengan kontrol langsung investor terhadap operasional perusahaan. Dengan karakteristik tersebut, FDI tidak hanya berperan sebagai sarana produksi dan pemasaran di negara tujuan tetapi juga mencerminkan komitmen jangka panjang investor asing terhadap perekonomian negara penerima (Zulfa & Millati, 2023; Isiaka et al., 2024)

Todaro & Smith (2020) menyatakan bahwa investasi asing langsung (FDI) merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang relatif paling stabil bagi negara berkembang dibandingkan dengan investasi portofolio. Selain itu, masuknya FDI mencerminkan tingkat kepercayaan investor asing terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, peningkatan arus FDI dapat dipandang sebagai sinyal positif bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sudut pandang strategis investor, arus masuk investasi asing langsung (FDI) umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu FDI yang berorientasi ekspor dan FDI yang berorientasi pasar domestik. FDI yang berorientasi ekspor disebut juga sebagai FDI vertikal. FDI vertikal merupakan investasi asing yang bertujuan mendirikan fasilitas produksi di negara tuan rumah untuk menghasilkan barang yang sebagian besar ditujukan sebagai pasar internasional, bukan untuk memenuhi permintaan domestik. Jenis investasi ini umumnya didorong oleh upaya perusahaan untuk menekan biaya produksi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif negara tujuan, seperti ketersediaan tenaga kerja dengan biaya relatif rendah serta daya saing biaya produksi secara keseluruhan. Sebaliknya, FDI berorientasi pada pasar domestik atau FDI horizontal ditujukan untuk memasuki dan mengembangkan pasar di negara tuan rumah. Dalam jenis investasi ini, barang dan jasa yang dihasilkan terutama dipasarkan secara lokal dengan tujuan memperluas pangsa pasar perusahaan investor serta mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan multinasional (Indriawati et al., 2025).

2.1.2.2 Teori Investasi Asing Langsung

a. Neo Classical Theory

Teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi dengan melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan, lazimnya meminjam teori ekonomi pembangunan, yaitu *Neo Classical Economic Theory* yang dikemukakan oleh R. F. Harrod pada tahun 1939 dan Evsey Domar pada tahun 1947 (Zaidun, 2005).

Teori ini menekankan pentingnya investasi sebagai faktor utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Investasi berperan dalam memperluas kapasitas produksi sekaligus menjaga tingkat permintaan agregat, sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyiratkan bahwa aliran modal eksternal seperti investasi asing langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan investasi asing memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi negara penerima modal (Simanjuntak et al., 2024).

Seid dalam Satriawan (2021) menyatakan bahwa beberapa faktor yang saling terkait yang dapat mendukung pendapat tersebut adalah:

- Investor asing sering kali membawa modal ke *host country* yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas di *host country*;
- Aliran modal dan investasi kembali keuntungan, mendorong peningkatan *total saving* di *host country*; dan
- Pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak dan pembayaran

Fakta ini menunjukkan bahwa modal asing dibawa ke *host country* juga mendorong modal domestik yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagai usaha. Hal ini sejalan dengan kesimpulan Sonarjah yang menyatakan itu secara keseluruhan investasi asing langsung bermanfaat atau menguntungkan bagi *host country* sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

b. Teori Eklektik/Paradigma OLI

Paradigma OLI pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Inggris, John H. Dunning pada tahun 1980-an (Fawaz, 2025) dan dikenal juga dengan sebutan

Pendekatan Eklektik dalam Produksi Internasional (*Electric Approach of International Production*). Dalam perkembangannya, teori ini menyesuaikan diri dengan dinamika global. Dunning dan Lundan (2008) menjelaskan agar dapat melakukan FDI, investor harus memiliki tiga keunggulan, yaitu

- 1) Keunggulan Kepemilikan (*Ownership Advantage*) dalam hal ini merujuk pada kemampuan unik atau sumber daya tidak berwujud yang memberikannya keunggulan kompetitif di pasar. Sumber daya tersebut meliputi hal paten, merek dagang, dan akses ke pasar keuangan.
- 2) Keunggulan Lokasi (*Location Advantage*) didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan dengan beroperasi di negara lain karena adanya manfaat ekonomi, politik, atau keuntungan lain yang spesifik terhadap lokasi. Keuntungan ekonomi dan kelembagaan termasuk ukuran pasar domestik dan beroperasi di negara dengan biaya lebih rendah dalam produksi, transportasi, atau telekomunikasi. Adapun keuntungan politik meliputi keberadaan kebijakan FDI yang kondusif, seperti tingkat pajak yang lebih rendah dan ketiadaan hambatan tarif.
- 3) Keunggulan Internalisasi (*Internalization Advantage*) menjelaskan bahwa keuntungan internalisasi muncul ketika manfaat melakukan aktivitas produksi atau operasional secara langsung di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan menyalurkan produk melalui ekspor atau mekanisme pasar lainnya

Dalam teori Eklektik ini, *location advantages* menjadi landasan teoritis dalam FDI. *Location advantage* merupakan keunggulan geografis yang melekat pada suatu wilayah yang tidak dapat dipindahkan dan terbuka untuk dimanfaatkan

seluruh pelaku bisnis. Dunning & Lundan (2008) dalam Purwono & Hayati (2021) menjelaskan Paradigma OLI tersebut dapat diturunkan menjadi motivasi bagi perusahaan multinasional untuk memilih lokasi berinvestasi, yaitu:

- 1) *Resource seeking* menjelaskan bahwa perusahaan memilih untuk menanamkan modalnya di suatu negara untuk memperoleh input atau kualitas produksi yang tidak tersedia di negara asal perusahaan tersebut atau terdapat sumber daya dengan mutu lebih dengan biaya yang lebih murah secara relatif jika dibandingkan di negara asal. Motif resource seeking dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, mencari sumber daya fisik tertentu, seperti bahan bakar mineral, logam, mineral industri, serta produk pertanian. Kedua, perusahaan multinasional mencari tenaga kerja tidak terampil atau semi terampil yang tersedia dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah.
- 2) *Market seeking* menjelaskan bahwa perusahaan melakukan investasi dengan tujuan utama untuk mengakses pasar domestik di negara tujuan. Perusahaan multinasional terdorong untuk melakukan investasi guna memasuki pasar baru, memperluas pangsa pasar, memperkenalkan produk atau layanan, serta mempertahankan posisi perusahaan di pasar yang telah ada. Motif ini didasarkan pada penilaian terhadap potensi pasar, yang tercermin dari ukuran pasar maupun tingkat pertumbuhan pasar.
- 3) *Efficiency seeking* dalam motif ini investor melakukan investasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan perbedaan biaya dan ketersediaan faktor produksi antarnegara. Strategi ini dilakukan dengan memusatkan kegiatan produksi pada lokasi yang paling efisien guna

memperoleh keuntungan dari skala ekonomi dan sistem manajemen yang terintegrasi, sementara hasil produksinya dapat dipasarkan ke berbagai negara. Keputusan investasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbukaan perdagangan, kualitas infrastruktur, tingkat inflasi, dan suku bunga.

Berdasarkan pemaparan teori Dunning tersebut, determinan investasi asing yang digunakan dalam penelitian ini meliputi keterbukaan perdagangan sebagai proksi dari motif *efficiency seeking*, serta PDB sebagai proksi dari *market seeking*.

c. Teori Kualitas Institusi

Teori mengenai kualitas institusi dijelaskan oleh pemikiran Douglas C. North dalam bukunya yang berjudul *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* tahun 1990. North (1990) menjelaskan bahwa institusi bersama dengan teknologi yang digunakan memiliki peran penting dalam menentukan kinerja perekonomian. Kualitas institusi mempengaruhi besar kecilnya biaya transaksi dan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Institusi yang stabil dan kredibel cenderung menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, sehingga mampu mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta memacu inovasi yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan yang lemah, seperti regulasi yang rumit dan berlebihan, tingginya korupsi, perpajakan yang berlebihan, serta adanya pembatasan aktivitas kewirausahaan dapat menjadi hambatan bagi masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, keberadaan institusi yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan antar pelaku pasar, mengurangi risiko investasi pada

modal fisik dan sumber daya manusia, serta menjamin perlindungan hak milik (*property right*) dan penegakan kontrak (Purwono & Hayati, 2021). Dalam penelitian ini, kualitas institusi diukur menggunakan satu indikator dari *Worldwide Governance indicators*, yaitu Indeks Persepsi Korupsi.

2.1.3 Indeks Persepsi Korupsi

2.1.3.1 Pengertian Indeks Persepsi Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*, yang menggambarkan perubahan dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi keadaan yang menyimpang. Kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna merusak, membusukkan, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau melakukan penyuapan (Syauket & Wijanarko, 2024). Istilah tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun orang lain (Rosikah & Listianingsih, 2021).

Menurut *Transparency International* korupsi diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian korupsi adalah sebuah tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang karena kekuasaannya (Saepuloh, 2022).

Indeks persepsi korupsi merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat korupsi di suatu negara. Indeks persepsi korupsi

merupakan hasil pengukuran yang dipublikasikan oleh *Transparency International* dan rutin dipublikasikan setiap tahun sejak tahun 1995. Untuk mengukur tingkat korupsi, poin IPK berada pada rentang 0 hingga 100, di mana nilai yang mendekati 0 mencerminkan tingkat korupsi yang semakin tinggi, sedangkan nilai yang semakin mendekati 100 menunjukkan tingkat korupsi yang semakin rendah.

2.1.3.2 Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi

Dalam penelitian ini, data korupsi yang digunakan adalah data dari *Corruption Perception Index* yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Indeks Persepsi Korupsi indikator yang menggabungkan data dari berbagai sumber terpercaya yang mencerminkan pandangan pelaku bisnis dan pakar negara terhadap tingkat korupsi di sektor publik. Untuk menghitung indeks ini, *Transparency International* menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pilih sumber data

Setiap sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Persepsi Korupsi harus memenuhi kriteria ketat agar dianggap sebagai sumber yang sah, antara lain:

- Mengukur risiko atau persepsi korupsi di sektor publik
- Menggunakan metodologi yang handal dan valid
- Diterbitkan oleh lembaga bereputasi
- Menyediakan variasi poin yang cukup untuk membedakan antarnegara
- Mencakup penilaian terhadap banyak negara di berbagai wilayah
- Hanya melibatkan opini pakar negara atau pelaku bisnis
- Diperbarui minimal setiap dua tahun

Saat ini, Indeks Persepsi Korupsi dihitung menggunakan 13 sumber data dari 12 institusi berbeda yang telah mencatat persepsi korupsi dalam dua tahun terakhir. 13 sumber data yang digunakan untuk menyusun Indeks Persepsi Korupsi yaitu *African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment*, *Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators*, *Bertelsmann Stiftung Transformation Indeks*, *Economist Intelligence Unit Country Risk Service*, *Freedom House Nations in Transit*, *Global Insight Country Risk Ratings*, *IMD World Competitiveness Center world competitiveness yearbook executive opinion survei*, *Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence*, *The PRS Group International Country Risk Guide*, *World Bank Country Policy and Institutional Assessment*, *World Economic Forum Executive Opinion Survei*, *World Justice Project Rule of Law Index Expert Survei*, *Varieties of Democracy*

b. Standarisasi sumber data ke skala 0-100

Proses ini dilakukan dengan mengurangi rata-rata sumber pada tahun dasar dari setiap poin negara, kemudian membaginya dengan deviasi standar sumber tersebut pada tahun dasar. Pendekatan ini memastikan poin IPK dapat dibandingkan secara konsisten setiap tahun sejak 2012. Selanjutnya, poin yang distandarisasi dikonversi ke skala IPK dengan mengalikannya dengan deviasi standar IPK tahun 2012 yaitu 20 dan menambahkan rata-rata IPK tahun 2012 yaitu 45, sehingga sesuai dengan rentang 0-100.

c. Hitung rata-rata

Poin IPK akhir sebuah negara ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata dari seluruh poin sumber data yang telah distandarisasi. Kemudian dibulatkan ke

bilangan bulat terdekat. Sebagai syarat, suatu negara baru dapat dimasukkan dalam IPK jika dinilai minimal oleh tiga sumber data yang berbeda

d. Pelaporan ukuran ketidakpastian

Untuk menjaga transparansi dan akurasi data, poin IPK juga dilengkapi dengan indikator kesalahan standar dan interval kepercayaan. Komponen ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat variasi atau persebaran data di antara sumber-sumber yang digunakan bagi setiap negara

2.1.3.3 Teori Korupsi

Teori Jack Bologna

Jack Bologna menjelaskan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Pandangan tersebut dirumuskan dalam teori yang dikenal dengan akronim *GONE*, yaitu *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan), dan *Expose* (Penegakan Hukum). Menurut teori, tindakan korupsi cenderung terjadi ketika keempat unsur tersebut hadir secara bersamaan. Keserakahan yang dimiliki individu, apabila didukung oleh adanya kesempatan yang terbuka dan diperkuat oleh berbagai kebutuhan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Kondisi ini semakin diperparah apabila sistem hukum tidak berjalan secara tegas yang ditandai dengan lemahnya pengawasan serta sanksi yang ringan terhadap pelaku, sehingga tidak menimbulkan efek jera (Bologna & Singleton, 2006)

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori ini dinilai relevan dalam menggambarkan kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Secara umum, praktik korupsi dapat dipahami melalui interaksi dari keempat variabel utama

tersebut. Dorongan berupa kebutuhan dan keserakahan individu untuk melakukan korupsi semakin diperkuat oleh adanya kesempatan yang muncul dari posisi atau jabatan yang dimiliki dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Kedudukan dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, yang tercermin dari sanksi pidana yang tidak sebanding dengan keuntungan besar yang diperoleh dari tindakan korupsi, serta perilaku aparat penegak hukum yang rentan terhadap praktik suap dengan tujuan meringankan hukuman bagi pelaku korupsi (Bologna & Singleton, 2006 dalam Wilhelmus, 2017)

2.1.4 Produk Domestik Bruto

2.1.4.1 Pengertian Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asli dan warga negara asing pada suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sementara itu, barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri tidak dihitung dalam PDB (Erowati, 2024). Barang dan jasa akhir adalah barang dan jasa yang siap digunakan oleh konsumen akhir atau digunakan sebagai input untuk produksi barang dan jasa lainnya (Hariyono, 2024)

Menurut Hariyono (2024), terdapat empat komponen PDB, yaitu:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)

Mewakili nilai total barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk konsumsi akhir. Nilai barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk penggunaan sehari-hari.

b. Pengeluaran investasi (I)

Mewakili total nilai barang dan jasa yang dibeli untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Nilai barang dan jasa yang dibeli oleh suatu bisnis untuk meningkatkan kemampuan produksinya.

c. Pengeluaran pemerintah (G)

Merupakan nilai total barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan publik. Nilai barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah dalam rangka menyediakan layanan publik dan infrastruktur.

d. Net ekspor (X-M)

Mewakili nilai total ekspor barang dan jasa dikurangi nilai impor barang dan jasa. Nilai barang dan jasa yang diekspor dikurangi dari nilai barang dan jasa impor.

Menurut Mankiw (2021) dalam bukunya yang berjudul *Principle of Economics* terdapat dua jenis Produk Domestik Bruto, yaitu:

- a. Nominal PDB, merupakan PDB yang memperhitungkan nilai barang dan jasa berdasarkan pada harga berlaku. PDB atas harga berlaku menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada saat PDB tersebut dihitung. PDB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui besarnya nilai PDB pada waktu tertentu, atau dengan kata lain, untuk mengetahui level PDB dan melihat perubahan struktur ekonomi suatu negara.
- b. Real PDB, merupakan PDB yang memperhitungkan nilai barang dan jasa berdasarkan pada harga konstan. PDB real tidak dipengaruhi oleh perubahan

harga (hanya menurut harga pada suatu tahun dasar), maka PDB hanya mencerminkan perubahan kuantitas produksi.

2.1.4.2 Menghitung Produk Domestik Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2024) Produk Domestik Bruto dapat dihitung melalui tiga pendekatan yaitu:

- a. PDB menurut pendekatan produksi atau biasa dikenal dengan PDB lapangan usaha, menjelaskan barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi yang beroperasi di suatu negara selama suatu periode waktu tertentu. Pendekatan produksi menghitung PDB dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh unit produksi di dalam negeri.
- b. PDB menurut pendekatan pendapatan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau satu tahun. Komponennya meliputi upah dan gaji tenaga kerja, sewa tanah atau properti, bunga modal, serta laba kewirausahaan (Rifta, 2025).

$$PDB = w + r + i + p$$

Keterangan:

w = Upah

r = Sewa

i = Bunga

p = Laba

- c. PDB menurut pengeluaran menjelaskan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi pengeluaran

konsumsi akhir, pembentukan modal, perubahan inventori, dan ekspor serta impor. Pendekatan pengeluaran menghitung PDB dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran akhir atas barang dan jasa. Komponennya terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto (Rifta, 2025).

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

2.1.5 Keterbukaan Perdagangan

2.1.5.1 Definisi Keterbukaan Perdagangan

Keterbukaan perdagangan mencerminkan tingkat kebebasan suatu negara dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor yang menunjukkan sejauh mana perdagangan internasional dijalankan tanpa hambatan yang signifikan (Prawoto, 2019). Melalui konsep ini, dapat diketahui apakah kebijakan perdagangan suatu negara cenderung terbuka atau justru bersifat ketat dalam mengatur arus perdagangan luar negeri (Saha et al., 2022). Pada umumnya negara dengan sistem ekonomi terbuka cenderung lebih diminati oleh investor asing karena menyediakan akses yang lebih luas terhadap pasar global, mendorong peningkatan efisiensi

ekonomi, serta memperkuat keterkaitan antara pasar domestik dan pasar internasional.

Keterbukaan perdagangan umumnya diukur dengan membandingkan total nilai ekspor dan impor suatu negara terhadap ukuran perekonomiannya, yaitu Produk Domestik Bruto. Pengukuran ini dilakukan melalui rasio jumlah ekspor dan impor terhadap PDB, yang mencerminkan tingkat keterlibatan suatu negara dalam perdagangan internasional, sebagaimana digunakan dalam penelitian Ardina & Astuti (2025), Hossain et al. (2024), dan (Randa, 2023).

2.1.5.2 Menghitung Keterbukaan Perdagangan

Berikut ini adalah persamaan atau rumus untuk menghitung keterbukaan perdagangan:

$$KP = \frac{(X + M)}{PDB} \times 100\%$$

Keterangan:

KP = Keterbukaan Perdagangan

X = Ekspor

M = Impor

PDB = Produk Domestik Bruto

Menurut Nowbutsing (2014) terdapat 3 kategori untuk mengetahui tingkat keterbukaan perdagangan.

Tabel 2.1
Kategori Keterbukaan Perdagangan

Persentase	Kategori
<50%	Rendah
>50% - <100%	Sedang
>100%	Tinggi

2.1.5.3 Teori Keterbukaan Perdagangan

Teori Heckscher-Ohlin atau yang biasa dikenal sebagai “*The proportional Factor Theory*” merupakan salah satu teori modern dalam perdagangan internasional yang menjelaskan bahwa perbedaan kepemilikan dan proporsi faktor produksi (*factor endowment*) antarnegara menyebabkan perbedaan biaya, harga barang, dan tingkat produktivitas antarnegara. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa negara dengan ketersediaan faktor produksi yang relatif melimpah dan berbiaya rendah akan melakukan spesialisasi pada produk tertentu untuk kemudian diekspor ke negara lain. Sebaliknya, negara yang memiliki faktor produksi relatif terbatas dan berbiaya tinggi cenderung memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan impor (B. Kurniawan & Raspati, 2014).

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.2 akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu dapat diketahui pengaruh antara variabel Investasi Asing Langsung, indeks persepsi korupsi, Produk Domestik Bruto, dan Keterbukaan Perdagangan yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang dilaksanakan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Almuqrin Fawaz. 2025. <i>Locational advantages and Foreign Direct Investment in MENA: A comprehensive analysis of institutional and economic factors</i>	PDB, Keterbukaan Perdagangan	Inflasi <i>Financial Development index, institutions index, energy index</i>	PDB, TO berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dan pendek. <i>Financial Development</i> berpengaruh tidak signifikan dalam jangka panjang dan pendek. Indeks energi, indeks institusi hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap FDI.	Transnational Corporational Review
2	Ashurov Ramazon Tura Ugli, Alfira Sofia, Yusupov Komaliddin Bahtiyor Ugli. 2025. <i>Does The Effect of Corruption on Foreign Direct Investment in Developed and Developing Countries</i>	Indeks Persepsi Korupsi	PDB, Keterbukaan Perdagangan	Negara Uzbekistan, Nigeria, dan Indonesia menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Senegal dan kamboja menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Sedangkan India, Afrika Selatan, dan Mesir menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap FDI.	International Journal Management Science and Business. 7(1). 1-8
3	Rizky Dwi Kurniawan, Wirya Wardaya, 2025. <i>Analysis of</i>	PDB, Keterbukaan Perdagangan	<i>Exchange rate, infrastructure</i> Metode ECM	Dalam jangka panjang PDB berpengaruh positif tidak signifikan, <i>exchange rate</i>	International Journal of Business and Applied Economics

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	<i>Factors Influencing Foreign Direct Investment in Indonesia Using the Dunning Model.</i>			berpengaruh negatif tidak signifikan. Sedangkan TO dan <i>infrastructure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Dalam jangka pendek PDB, <i>exchange rate</i> , dan <i>infrastructure</i> berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan TO berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI.	(IJBAE). 4(4).2015-2032
4	Sharon Rayadi, Eko Agus Endarto. 2025. <i>The Influence of Market Size, Trade Openness, Inflation, And Financial Development on FDI in Indonesia</i>	Keterbukaan Perdagangan	<i>Market Size, Inflation, Financial Development</i>	<i>Market size, TO, financial development</i> berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan <i>inflation</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan.	Journal of Management, Accounting and Business Research (JMABR). 1(1). 1-26
5	Mayang Ardina, Rini Dwi Astuti. 2025. Analisis Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi dan Indikator Makroekonomi Terhadap Investasi Asing Langsung di Negara-Negara ASEAN Tahun 2013-2022	Indeks Persepsi Korupsi, Keterbukaan Perdagangan	Ukuran Pasar, inflasi	Indeks persepsi korupsi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan ukuran pasar, inflasi, dan TO berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Delapan Negara ASEAN.	Jurnal Ekonomi-Qu. 15. 1-12
6	Ulul Albab. 2025. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Nilai	Keterbukaan Perdagangan	Pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan nilai tukar	Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tukar, dan Keterbukaan Perdagangan terhadap FDI di Indonesia			berpengaruh positif dan signifikan, serta TO berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI di Indonesia.	1(4). 2094-1203
7	Md. Shaddam Hossain, Liton Chandra Voumik, Tahsin Tabassum Ahmed, Mehnaz Binta Alam, Zabin Tasmin. 2024. <i>Impact of geopolitical risk, PDB, inflation, interest rate, and trade openness on foreign direct investment: Evidence from five Southeast Asian countries</i>	PDB, Keterbukaan Perdagangan	<i>Geopolitical risk, inflation, interest rate</i>	<i>Geopolitical risk</i> dan TO berdampak negatif. PDB, <i>inflation, interest rate</i> berpengaruh positif terhadap FDI di lima negara Asia Tenggara.	Regional Sustainability. 5(4). 100177
8	Enry Juliawan & Sapriyadi, 2024. Menakar Dampak Politik dan Keamanan terhadap Investasi di Indonesia.	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Demokrasi dan angka kriminalitas	Indeks persepsi korupsi dan indeks demokrasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, sedangkan angka kriminalitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi di Indonesia.	Buletin of Economic Studies (BEST). 4(1). 31-41
9	Fiona, Nasar Buntu Laulita. 2023. <i>The effect of inflation, interest rate, exchange rate, corruption perception indeks, and</i>	Indeks Persepsi Korupsi, Keterbukaan Perdagangan	<i>Inflation, interest rate, exchange rate</i>	<i>Inflation</i> dan <i>interest rate</i> tidak berpengaruh terhadap FDI. Sedangkan <i>exchange rate</i> berpengaruh positif dan signifikan, <i>corruption perception index</i> , dan <i>trade openness</i> berpengaruh	Journal of Business Studies and Management Review (JBSMR). 7(1). 58-65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>trade openness on foreign direct investment in 6 ASEAN countries.</i>			negatif dan signifikan terhadap FDI di 6 Negara ASEAN.	
10	Fradya Randa. 2023. Pengaruh Variabel Makro ekonomi terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia	Keterbukaan Perdagangan	Inflasi, nilai tukar, uang beredar, ukuran pasar, neraca transaksi berjalan.	Uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI dalam jangka pendek dan panjang. Inflasi dan keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap FDI hanya dalam jangka panjang. Ukuran pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI hanya dalam jangka pendek.	Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
11	Wina, Indriyani Febri Nur Rohmawati, Muhammad Lazuardi Abimanyu. 2023. <i>The Influence of Control of Corruption, Political Stability and Macroeconomic Variables on Foreign Direct Investment in Emerging Market Asian Countries.</i>	Produk Domestik Bruto, Indeks Persepsi Korupsi	Inflasi, Suku Bunga, Stabilitas Politik	Produk Domestik Bruto dan Stabilitas politik berpengaruh positif dan tidak signifikan, inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan indeks persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Foreign Direct Investment</i>	Asian Journal of Social Science and Management Technology

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Diana Lestari, Dadang Lesmana, Yanzil Azizil Yudarudin, dan Rizky Yudarudin. <i>The Impact of Financial Development and Corruption on Foreign Direct Investment in Developing Countries.</i>	Indeks persepsi korupsi	<i>Financial development</i>	<i>Financial development</i> berpengaruh positif signifikan terhadap FDI, sedangkan korupsi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDI.	Investment Management and Financial Innovations. 19(2). 211-220
13	Clarisa Sasti Bintoro. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi Asing Langsung di Indonesia	Produk Domestik Bruto	Ekspor, Angkatan Kerja	PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI hanya dalam jangka pendek. Ekspor berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka panjang serta dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI Angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang serta dalam jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap FDI.	Jurnal Economina. 1(3).
14	Muhammad Cahya Purnama. 2022. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Investasi Asing Langsung di ASEAN-5	Indeks Persepsi Korupsi	Inflasi dan Nilai Tukar	Indeks persepsi korupsi dan nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di Indonesia. Sedangkan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDI di Indonesia.	Jurnal Ekonomi Aktual.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Saepudin & Marselina. 2022. Pengaruh Kerapuhan Negara, Keterbukaan Perdagangan, dan Angkatan Kerja terhadap Masuknya Investasi Asing Langsung di 9 Negara ASEAN Periode 2016-2020	Keterbukaan Perdagangan	Kerapuhan Negara, Angkatan Kerja	Kerapuhan negara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDI. Sedangkan keterbukaan perdagangan dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI di 9 Negara ASEAN.	Jurnal Klassen. 2(2).141-156

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Indeks Persepsi Korupsi dengan Investasi Asing Langsung

Menurut *Transparency International* korupsi didefinisikan sebagai suatu perilaku yang ilegal dan tidak wajar untuk menambah kekayaan diri sendiri dengan memanfaatkan sebuah jabatan atau menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Tingkat korupsi diukur menggunakan indeks persepsi korupsi dengan skala 0-100. Nilai indeks yang semakin rendah atau mendekati angka 0 menunjukkan tingginya tingkat korupsi di suatu negara. Sebaliknya, semakin tinggi nilai indeks atau mendekati angka 100, semakin rendah tingkat korupsi yang mencerminkan kondisi suatu negara yang relatif lebih bersih dari praktik korupsi.

Korupsi menjadi faktor yang dapat memberikan pengaruh untuk arus masuk investasi asing langsung. Hal ini dikarenakan korupsi dan investasi berkaitan untuk membentuk suatu keamanan dan kenyamanan serta iklim investasi yang baik. Dalam kaitannya dengan investasi asing langsung, indeks persepsi korupsi memiliki hubungan yang positif terhadap arus investasi asing langsung. Semakin

tinggi nilai indeks persepsi korupsi, yang berarti bahwa korupsi semakin rendah, maka lingkungan investasi cenderung menjadi lebih transparan, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga lebih menarik bagi investor asing (Cicchello et al., 2023; Lund University, 2020).

Sebaliknya, tingkat korupsi yang tinggi cenderung menghambat masuknya investasi asing langsung. Praktik korupsi yang tinggi berpotensi mengganggu stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada krisis keuangan atau kebangkrutan negara. Oleh karena itu, tingkat korupsi yang tinggi cenderung membuat investor bersikap lebih berhati-hati dan mempertimbangkan kembali keputusan untuk menanamkan modal di negara tujuan (Hymer, 1960).

Hal ini sejalan dengan teori *sand the wheel* yang mengemukakan bahwa korupsi memiliki dampak negatif. Aidt (2019) menggambarkan korupsi sebagai “pasir dalam roda” (*sand in the wheels*) yang dapat menghambat jalannya aktivitas ekonomi. Korupsi menyebabkan beban tambahan bagi perusahaan, meningkatkan ketidakpastian, serta menghambat potensi keterlibatan pihak asing dalam kerja sama usaha sehingga berdampak pada berkurangnya arus investasi asing. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang sarat praktik korupsi cenderung menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi dan tingkat kepastian yang lebih besar, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan investasi yang diambil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai indeks persepsi korupsi yang mencerminkan rendahnya tingkat korupsi, maka semakin

besar juga potensi suatu negara untuk menarik arus masuk investasi asing langsung. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Enry Juliawan & Sapriyadi (2024) yang menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia, temuan serupa juga diperoleh oleh Muadzah & Sukarniati (2024), Wina et al. (2023), dan Purnama (2022) pada negara-negara ASEAN.

2.2.2 Hubungan Produk Domestik Bruto dengan Investasi Asing Langsung

Produk Domestik Bruto merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan FDI. PDB dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan FDI dikarenakan PDB mencerminkan peluang penjualan yang lebih luas di negara tujuan investasi. Investor asing cenderung lebih tertarik menanamkan modal di negara yang menunjukkan pertumbuhan pasar yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga peningkatan PDB mendorong meningkatnya arus FDI (Mukhtar et al., 2019).

Penjelasan tersebut sejalan dengan dengan Teori Electic Paradigm yang dikemukakan Dunning & Lundan (2008), bahwa salah satu determinan utama FDI adalah motivasi *market seeking*, yaitu investasi yang bertujuan untuk menembus pasar domestik di negara penerima. Motivasi ini umumnya berkaitan dengan ukuran pasar, tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta karakteristik dan preferensi konsumen. FDI yang berorientasi pasar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu, di mana semakin besar pasar lokal, semakin tinggi daya tariknya bagi perusahaan multinasional untuk melakukan FDI (Pratiwi, 2020). Oleh karena itu,

ukuran pasar sering diproksikan melalui PDB, PDB per kapita, populasi (Resmini, 2000).

PDB yang meningkat akan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat, memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan pada akhirnya mendorong peningkatan investasi asing langsung. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2025) yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia, temuan serupa juga diperoleh oleh Hossain et al. (2024) dan Aslam & Rudatin (2022) di negara-negara ASEAN.

2.2.3 Hubungan Keterbukaan Perdagangan dengan Investasi Asing Langsung

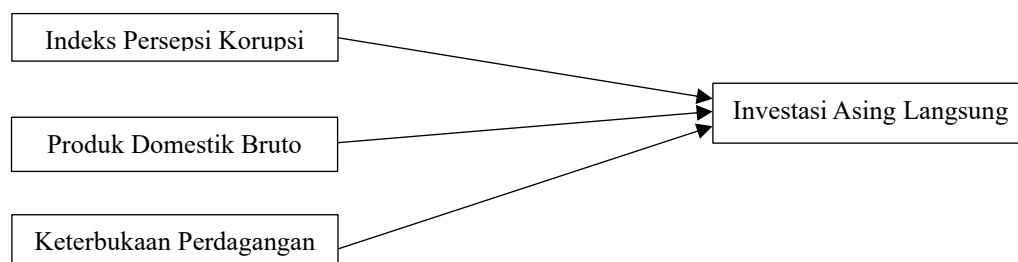
Keterbukaan perdagangan mencerminkan sejauh mana suatu negara menjalankan aktivitas ekspor dan impor dengan hambatan tarif maupun non tarif yang relatif rendah (Prawoto, 2019). Negara yang menerapkan sistem ekonomi terbuka umumnya lebih menarik bagi investor asing karena memberikan akses yang luas ke pasar global, meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, serta memperkuat keterkaitan antara pasar domestik dan internasional.

Menurut Dunning dalam kerangka Teori Electic (OLI), keterbukaan perdagangan merupakan bagian dari keunggulan lokasi yang dapat meningkatkan daya tarik FDI, khususnya bagi investor dengan motif mencari efisiensi. Tingginya tingkat keterbukaan perdagangan menggambarkan intensitas transaksi internasional yang besar, sehingga memudahkan perusahaan multinasional yang berorientasi ekspor untuk menyalurkan hasil produksinya tidak hanya di pasar domestik tetapi

juga ke pasar internasional. Selain itu, rendahnya hambatan perdagangan di negara dengan ekonomi terbuka memungkinkan perusahaan melakukan kegiatan ekspor dan impor bahan baku dengan biaya yang lebih efisien. Oleh karena itu, investor cenderung menghindari negara yang menerapkan kebijakan perdagangan tertutup dan lebih memilih negara dengan tingkat keterbukaan yang tinggi guna meminimalkan biaya dan mengurangi hambatan dalam aktivitas perdagangan internasional (Purwono & Hayati, 2021).

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rayadi & Endarto (2025) yang menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia, temuan serupa juga diperoleh oleh Ardina & Astuti (2025), dan Saepudin & Marselina (2022) di negara-negara ASEAN.

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu bahwa Indeks Persepsi Korupsi, Produk Domestik Bruto, dan Keterbukaan Perdagangan akan diuji pengaruhnya terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2002-2024. Dengan demikian dapat dirumuskan paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga secara parsial Indeks Persepsi Korupsi, Produk Domestik Bruto, dan Keterbukaan Perdagangan berpengaruh positif terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2002-2024
2. Diduga secara simultan Indeks Persepsi Korupsi, Produk Domestik Bruto, dan Keterbukaan Perdagangan berpengaruh terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2002-2024.